



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/1/2023**

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS

**PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN 2023**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2023 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan DPRD Kota Madiun dan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Pandangan sekaligus Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 pada tanggal 7 Februari 2023, telah diputuskan bahwa 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 yang diajukan disetujui dengan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk melaksanakan perubahan dan penyempurnaan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 2 Februari 2022 Nomor 170/302/401.040/2023 Perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kota Madiun Tahap I Tahun 2023;
 2. Surat Bapemperda DPRD Kota Madiun tanggal 3 Februari 2023 Perihal Usulan Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 6 Februari 2023 dengan Acara Penyampaian Nota Penjelasan Bapemperda/Pengusul atas 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;
 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 7 Februari 2023 dengan Acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pandangan sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD atas 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;
 5. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 7 Februari 2023 Nomor 001/F.PDIP/II/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;
 6. Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun tanggal 7 Februari 2023 Nomor 01/F.Demokrat/II/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;
 7. Surat Ketua Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun tanggal 7 Februari 2023 Nomor 001/F.Perindo/II/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;
 8. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun tanggal 7 Februari 2023 Nomor 003/F.PKS-PAN/II/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;

9. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 7 Februari 2023 Nomor 01/FPKB-03/II/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;
10. Surat Ketua Fraksi PSI-NASDEM DPRD Kota Madiun tanggal 7 Februari 2023 01/F.PSI-NASDEM/II/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;
11. Surat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tanggal 7 Februari 2023 Nomor 02/F.Gerindra/II/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;
12. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 7 Februari 2023 dengan acara Penetapan Panitia Khusus DPRD Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran-lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 yang akan dibahas sebagaimana Diktum “Kesatu” adalah:
1. Raperda tentang Kerja Sama Daerah;
 2. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan
 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Literasi Digital.
- KETIGA** : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” sebagai berikut:
1. menyempurnakan 3 (tiga) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023;

2. melaksanakan Pendampingan Tim Ahli dalam rangka penyempurnaan, pembahasan dan Finalisasi Pembahasan 3 (tiga) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 dengan tenaga ahli;
3. melakukan harmonisasi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 dengan Kanwil Kemenkumham;
4. melaksanakan uji publik Rancangan Peraturan Daerah dengan masyarakat dan/atau *stake holder*;
5. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat pembahasan dan finalisasi pembahasan 3 (tiga) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun; dan
6. melaksanakan fasilitasi atas 3 (tiga) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 dengan Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

- KEEMPAT : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 7 Februari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/1/2023
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD
PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN 2023
TERHADAP RAPERDA TENTANG KERJA SAMA DAERAH**

1. Ketua : SUDJARWO, S.T.
2. Wakil Ketua : Drs. SUTARDI
3. Anggota : Drs. ISTONO, M.Pd.
4. Anggota : YULIANA
5. Anggota : SUDARJONO, S.T.
6. Anggota : TUTIK ENDANG SRI WAHYUNI
7. Anggota : RINA HARYATI, S.T., M.M.
8. Anggota : Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si.
9. Anggota : Drs. SUYARTO, M.Pd.
10. Anggota : Drs. SUBYANTARA
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/1/2023
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD
PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN 2023
TERHADAP RAPERDA FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

1. Ketua : H. NUR SALIM, S.Pd.I.
2. Wakil Ketua : YUNITA ALIYA WIJAYANI, S.Psi., M.Pd
3. Anggota : ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.
4. Anggota : HARI SANTOSO, S.T.
5. Anggota : F. BAGUS PANUNTUN
6. Anggota : SLAMET HARIYADI
7. Anggota : DWI JATMIKO AGUNG SUBROTO, S.H., S.E., M.M.
8. Anggota : H. AGUS WIYONO, S.H.
9. Anggota : ISMIATI, S.H., S.Pd.
10. Anggota : WINARKO, S.H., M.Hum.
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/1/2023
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD
PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN 2023
TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN LITERASI DIGITAL**

1. Ketua : HANDOKO BUDI SETYO, S.H.
2. Wakil Ketua : ERLINA SUSILORINI, S.Si., Apt., M.M.
3. Anggota : Drs. H. ARMAYA
4. Anggota : Y. RUDY WISNU WARDHANA
5. Anggota : DODIK DANANG SETIAWAN
6. Anggota : IHSAN ABDURRAHMAN SIDDIQ
7. Anggota : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, S.H., M.Hum.
8. Anggota : drg. INDAH SAT RACHMANIATI
9. Anggota : Drs. SUGENG, S.H., M.H.
10. Anggota : DEDI TRI ARIFianto, S.E.
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.